

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

Otonomi daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, Perubahan Kedua UU Pemerintah Provinsi Tahun 2014 Nomor 23 Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan struktur organisasi perangkat daerah, karakteristik daerah dan kemungkinan kebutuhannya, sehingga daerah dapat menggunakan kewenangannya dan lebih menyikapi dinamika yang ada di masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo (BPKAD) dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada di Kota Palopo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah, kebutuhan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang

dimilikinya, dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Palopo

Visi : Sesuai dengan tugas pokok dan tugas Badan Pengelolalam Keuangan dan Aset Daerah Palopo, maka disusunlah visi organisasi : *“Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan bermutu”..*

Misi: Telah ditetapkan 3 (tiga) misi untuk memperkuat visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, yaitu :

- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pelaksana pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Meningkatkan profesionalisme penyelenggara keuangan daerah dan pelayanan pengelolaan aset.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri atas:

a. Kepala Badan

b. Sekretaris :

1) Sub bagian umum dan kepegawaian

2) Sub bagian Perencanaan Keuangan evaluasi dan tindak lanjut

c. Bidang Anggaran dan Pembendaharaan

1) Sub bidang Penyusunan APBD

2) Sub bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Daerah

d. Bidang akuntansi dan pelaporan

- 1) Sub bidang akuntansi
- 2) Sub bidang pelaporan dan informasi keuangan daerah

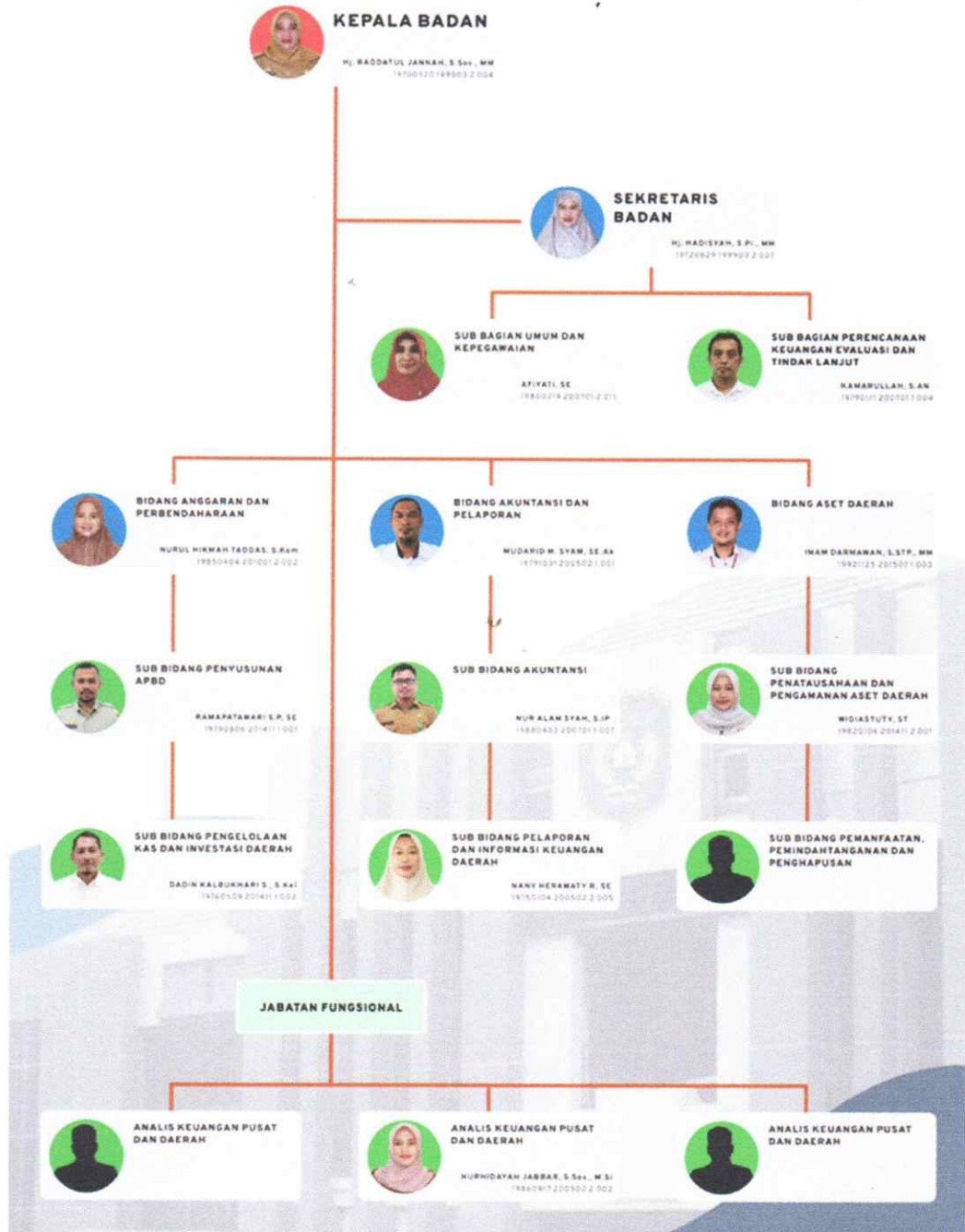
e. Bidang Aset Daerah

- 1) Sub bidang Penatausahaan dan pengamanan Aset Daerah
- 2) Sub bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan , dan Penghapusan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih Jelasnya Bagan Organisasi Badan Peengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dapat dilihat pada struktur organisasi berikut ini

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALOPO



4.1.4 Kedudukan, Tupoksi dan Fungsi

Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo adalah membantu walikota dalam melaksanakan tugas kantor yang bertanggung jawab kepada walikota di bawah di bidang pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah.

Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu untuk membantu walikota dalam urusan pelaporan keuangan daerah baik dari segi perencanaan, penatausahaan dan laporan keuangan

Sedangkan dalam fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Melaksanakan tugas bendahara umum daerah (BUD);
3. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan fungsional di bidang pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah;
4. Koordinasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Mengawasi dan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan dan keuangan daerah;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo menyelenggarakan

fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan tanggung jawab keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah juga berperan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1.5 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palopo adalah

- Mewujudkan aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai komitmen tinggi, bertanggung jawab, dan berpengalaman;
- Meningkatkan tanggung jawab atas laporan keuangan dan aset daerah;
- Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo yaitu

- Meningkatkan tanggung jawab, visi dan kompetensi PNS sesuai peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi daerah;
- Penerapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan yang transparan;
- Terlaksananya pengelolaan aset daerah secara akurat, efisien dan efektif;
- Penerapan layanan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah yang sederhana, jelas, aman, akuntabel, dan mudah diakses.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

a. Pendapatan Daerah

Pada Pasal 23, pendapatan daerah meliputi sebagai berikut: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 24 membagi kelompok pendapatan daerah menurut jenis pendapatannya: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan awal daerah lainnya yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah tersebut ditentukan menurut sumber penghasilannya menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sengaja di pisahkan, dibagi berdasarkan objek pendapatannya meliputi: sebagian laba modal pada Badan Usaha Milik Daerah , sebagian laba modal pada Badan Usaha Milik Negara, dan sebagian lagi saham. modal pada perusahaan swasta atau kelompok masyarakat. Pendapatan daerah dari anggaran, yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dialokasikan, disediakan untuk pendapatan daerah lain yang sah dan bersangkutan, dibagi berdasarkan pos-pos pendapatan. Meliputi: penghasilan tunai atau sebagian hasil penjualan kekayaan daerah yang belum dialokasikan, jasa giro, penghasilan bunga, penghasilan denda pajak, penghasilan denda, jasa sosial dan pelayanan umum, penghasilan penyelenggaraan .

b. Belanja Daerah

Menurut Pasal 29, Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan

pemerintahan di wilayah administrasi daerah, yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang dikelola pada beberapa departemen atau sektor yang dapat dikelola bersama oleh pemerintah daerah sesuai peraturan dengan peraturan-undangan. Pengeluaran yang berkaitan dengan diadakan urusan wajib tersebut diprioritaskan dengan tujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengutamakan pemenuhan tanggung jawab daerah, yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pelayanan yang layak. Fasilitas umum dan pengembangan asuransi sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui efisiensi kerja, mencapai persyaratan pelayanan minimal yang ditentukan dalam undang-undang.

4.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber yang berada dalam wilayahnya dan dipungut menurut peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan keuangan pemerintah, selain pendapatan lain-lain, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain yang sah, serta sisa anggaran tahun sebelumnya, yang dapat ditambahkan sebagai sumber pembiayaan. Bagian pemerintah daerah dari pendapatan tersebut tercermin dalam APBD setiap tahunnya, meskipun PAD tidak dapat membiayai APBD sepenuhnya.

Pemerintah Kota Palopo yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi

Selatan mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerah di wilayahnya. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pendapatan awal berdasarkan wilayah Kota Palopo pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Laporan PAD Kota Palopo Anggaran Setelah Perubahan dan Realisasi tahun 2020

No	U R A I A N	Anggaran Setelah	Realisasi	%
		Perubahan 2020 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah	173.393.617.952,00	177.205.052.456,65	102.20
	Pendapatan Pajak Daerah	33.028.000.000,00	34.031.809.461,00	103.04
	Pendapatan Retribusi Daerah	8.883.482.000,00	8.880.154.097,48	99.96
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.801.973.147,00	6.801.973.147,00	100.00
	Lain-lain PAD yang sah	124.680.162.805,00	127.491.115.751,17	102.25
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	173.393.617.952,00	177.205.052.456,65	102.20
2	DANA PERIMBANGAN	699,756,718,109,00	665,583,965,763,00	99.38
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16.073.016.000,00	18.379.394.493,00	114.35
	Dana Alokasi Umum	498.865.870.000,00	497.008.966.000,00	99.63
	Dana Alokasi Khusus	154.817.832.109,00	150.195.605.270,00	97.11
	Jumlah Pendapatan Transfer	699,756,718,109,00	665,583,965,763,00	99.38
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	126.411.914.006,00	126.619.916.373,62	100.16
	Pendapatan Hibah	66.470.610.413,00	65.516.179.506,00	98.56
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.715.623.393,00	46.443.640.112,62	99.42
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6.983.797.000,00	6.983.797.000,00	100.00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.241.883.200,00	7.664.639.200,00	122.79
	Pendapatan Lain-lain	-	11.660.555,00	100.00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	126.411.914.006,00	126.619.916.373,62	100.16
	Jumlah Pendapatan	969.562.250.067,00	969.408.934.593,27	99.98

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo 2020

Tabel 2. Laporan PAD Kota Palopo Anggaran Setelah Perubahan dan Realisasi tahun 2021

No	U R A I A N	Anggaran Setelah Perubahan 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (RP)	%
1	PENDAPATAN	957.596.278.224,00	936.589.797.578,17	97,81
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.896.341.415,00	140.133.041.613,17	91,06
	Pendapatan Pajak Daerah	41.022.700.000,00	35.622.582.580,00	86.84
	Pendapatan Retribusi Daerah	11.023.002.200,00	11.587.793.535,64	105.12
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.684.839.685,00	7.799.016.092,00	101.49
	Lain-lain PAD yang sah	94.165.799.530,00	85.123.649.405,53	90.40
3	PENDAPATAN TRANSFER	777.737.136.809,00	770.932.817.337,00	99.13
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	694.518.496.307,00	693.964.116.455,00	99.92
	Dana Bagi Hasil Pajak	12.375.774.487,00	17.551.974.441,00	141.83
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.988.406.820,00	7.660.438.101,00	153.56
	Dana Alokasi Umum	487.717.402.000,00	487.717.402.000,00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	189.436.913.000,00	181.034.301.913,00	95.56
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	28.986.517.000,00	28.986.517.000,00	100.00
	TRANSFER ANTAR DAERAH	102.214.307.384,00	102.214.307.384,00	88.48
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	49.315.459.502,00	43.065.519.882,00	87.33
	BANTUAN KEUANGAN	4.916.664.000,00	4.916.664.000,00	100.00
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.962.800.000,00	25.523.938.628,00	98.31
	Pendapatan Hibah	5.172.000.000,00	5.203.692.128,00	100.61
	Pendapatan Lainnya	20.790.800.000,00	20.320.246.500,00	97.74

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo tahun 2021

Tabel 3. Laporan PAD Kota Palopo Anggaran Setelah Perubahan dan Realisasi tahun 2022

No	U R A I A N	Anggaran Setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (RP)	%
1	PENDAPATAN	1.035.363.603.924,00	988.195.057.607,29	95.44
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	188.028.163.277,00	178.675.849.643,29	95.03
	Pendapatan Pajak Daerah	43.087.700.000,00	41.417.676.185,00	96.12
	Pendapatan Retribusi Daerah	13.005.979.000,00	18.041.089.576,00	138.71
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.113.957.327,00	7.036.243.575,00	98.91
	Lain-lain PAD yang sah	124.820.526.950,00	112.180.840.307,29	89.87
3	PENDAPATAN TRANSFER	813.048.040.559,00	799.667.311.290,00	98.35
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	748.232.014.391,00	737.667.819.914,00	98.59
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.816.026.168,00	61.999.491.376,00	95.65
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.287.400.088,00	9.851.896.674,00	28.73
	Pendapatan Hibah	12.255.559.000,00	388.586.620,00	3.17
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.031.841.088,00	9.463.310.054,00	42.95

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo tahun 2022

Tabel 4. Laporan PAD Kota Palopo Anggaran Setelah Perubahan dan Realisasi tahun 2023

No	U R A I A N	Anggaran Setelah Perubahan 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (RP)	%
1	PENDAPATAN	1.132.254.991.869,00	943.090.236.872,71	83.29
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	343.052.414.226,00	194.013.652.599,96	56.56
	Pendapatan Pajak Daerah	45.867.000.000,00	46.687.824.782,00	101.79
	Pendapatan Retribusi Daerah	11.722.844.000,00	10.560.295.890,00	90.08
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.347.070.226,00	7.347.070.226,00	100.00
	Lain-lain PAD yang sah	278.115.500.000,00	129.418.461.701,96	46.53
3	PENDAPATAN TRANSFER	746.306.406.557,00	736.794.913.617,75	98.73
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.928.190.461,00	664.163.217.719,00	99.73
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.378.216.096,00	72.631.695.898,75	90.36
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.896.171.086,00	12.281.670.655,00	28.63
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.896.171.086,00	12.281.670.655,00	28.63

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo tahun 2023

Dari keempat tabel di atas terlihat bahwa dari sisi pendapatan, dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menandakan Kota Palopo masih bergantung pada Bantuan negara pada periode 2020-2023.

Bisa kita lihat pula perbandingan selisih anggaran pendapatan serta realisasi

anggaran antara tahun 2020 - 2023, yaitu pada tahun 2020 anggaran pendapatannya sebesar **969.562.250.067,00** dan realisasi anggarannya **969.408.934.593,27**, sedangkan pada tahun anggaran 2023 Anggaran mengalami Kenaikan yang signifikan sebesar **1.132.254.991.869,00** dan realisasi mengalami penurunan sebesar **943.090.236.872,71**.

Kurangnya Realisasi Pendapatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena tidak semua orang menyatakan Nomor Pokok Pajak (NOP) sehubungan dengan renovasi tempat tinggalnya, kecuali pajak yang dipungut melalui pemungutan pajak. agensi pajak khususnya pemungutan pajak restoran atau toko, dan tidak dipungutnya pajak sesuai nominal pajak yang dibayarkan wajib pajak.

4.2.3 Penggunaan dan Alokasi Pendapatan Daerah

pendapatan Asli daerah juga menjadi sumber pembiayaan biaya daerah kota. Dana Alokasi umum adalah dana yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Dana distribusi umum dan pendapatan utama daerah dapat dikatakan sebagai pemberi dana belanja daerah yang paling penting karena jumlahnya yang besar, sehingga dapat dikatakan posisi dana alokasi umum (DAU) masih menjadi pendapatan utama daerah yang memegang peranan yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran belanja adalah anggaran yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Pembiayaan berarti setiap pendapatan atau pengeluaran yang dapat diganti yang dikembalikan baik pada tahun bersangkutan

maupun tahun anggaran berikutnya.

Pada tabel dibawah ini disajikan anggaran Belanja Daerah dan anggaran Pembiayaan Daerah Kota Palopo tahun Anggaran 2020 – 2023

Tabel 5. Laporan Penggunaan dan Alokasi Belanja Daerah tahun 2020 Kota Palopo

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2020 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)	%
1	BELANJA DAERAH	1.094.240.116.346,00	943.885.796.203,19	86,26
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	435.873.745.049,00	416.758.947.138,44	95,61
	Belanja Pegawai	412.153.601.459,00	396.944.426.658,00	96,31
	Belanja Bunga	3.626.200.100,00	2.053.411.769,44	56,63
	Belanja Hibah	7.622.100.000,00	5.592.900.000,00	73,38
	Belanja Bantuan Sosial	2.680.000.000,00	2.469.500.000,00	92,15
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	854.592.490,00	854.592.490,00	100,00
	Belanja Tidak Terduga	8.937.251.000,00	8.844.116.221,00	98,96
	BELANJA LANGSUNG	658.366.371.297,00	527.126.849.064,75	80,07
	Belanja Pegawai	65.841.767.300,00	64.657.156.562,00	98,20
	Belanja Barang dan Jasa	266.654.426.895,00	254.501.788.721,86	95,44
	Belanja Modal	325.870.177.102,00	207.967.903.780,89	63,82
	SURPLUS / (DEFISIT)	(124.677.866.279,00)	25.523.138.390,08	(20,47)
2	PEMBIAYAAN DAERAH			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	191.519.241.279,00	70.649.876.279,26	36,89
	"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya"	34.049.876.279,00	34.049.876.279,26	100,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	157.469.365.000,00	36.600.000.000,00	23,24
	PENGELUARAN DAERAH	66.841.375.000,00	49.341.373.129,24	73,82

Dipindahkan

Pindahan

	Pembayaran Pokok Utang	66.841.375.000,00	49.341.373.129,24	73,82
	PEMBIAYAAN NETTO	124.677.866.279,00	21.308.503.150,02	17,09
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	46.831.641.540,10	100,00

Sumber : Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo Tahun 2020.

Tabel 6. Laporan Penggunaan dan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021 kota Palopo

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	%
1	BELANJA DAERAH	1.001.572.261.730,00	935.475.348.254,12	93,40
	BELANJA OPERASI	768.633.962.391,00	728.746.015.160,19	94,81
	Belanja Pegawai	462.110.345.217,00	450.043.897.859,00	97,39
	Belanja Barang dan Jasa	292.869.315.688,00	268.500.193.172,79	91,68
	Belanja Bunga	1.650.000.000,00	1.610.625.638,40	97,61
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
	Belanja Hibah	9.773.378.490,00	6.385.683.490,00	65,34
	Belanja Bantuan Sosial	2.230.922.996,00	2.205.615.000,00	98,87
	BELANJA MODAL	230.938.299.339,00	206.729.333.093,93	89,52
	Belanja Tanah	4.150.000.000,00	3.637.550.405,00	87,65
	Belanja Peralatan dan Mesin	52.480.471.969,00	50.560.379.782,00	96,34
	Belanja Gedung dan Bangunan	142.341.417.583,00	122.402.791.826,93	85,99
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.329.861.249,00	28.544.485.957,00	94,11
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.636.548.538,00	1.584.125.123,00	96,80
	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	0,00	-
	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	-
	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan Kab/Kota kepada Desa	0,00	0,00	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.975.983.506,00)	1.114.449.324,05	(2,53)

Dipindahkan

2	PEMBIAYAAN DAERAH			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51.117.358.506,00	48.531.641.540,10	94,94
	"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya"	46.917.358.506,00	46.831.641.540,10	99,82
	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.200.000.000,00	1.700.000.000,00	40,48
	PENGELUARAN DAERAH	7.141.375.000,00	4.641.373.129,24	64,99
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.141.375.000,00	4.641.373.129,24	64,99
	PEMBIAYAAN NETTO	43.975.983.506,00	43.890.268.410,86	99,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	45.004.717.734,91	100,00

Sumber :Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
Tahun 2021

Tabel 7. Laporan Penggunaan dan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2022 kota Palopo

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	%
1	BELANJA DAERAH	1.077.426.946.659,00	1.015.338.138.406,38	94,24
	BELANJA OPERASI	786.884.718.945,00	750.411.610.986,38	95,36
	Belanja Pegawai	465.451.178.019,00	441.768.132.501,20	94,91
	Belanja Barang dan Jasa	303.915.798.436,00	291.293.298.459,97	95,85
	Belanja Bunga	1.350.000.000,00	1.342.956.043,21	99,48
	Belanja Hibah	15.998.742.490,00	15.841.723.982,00	99,02
	Belanja Bantuan Sosial	169.000.000,00	165.500.000,00	97,93
	BELANJA MODAL	290.256.357.714,00	264.920.026.920,00	91,27
	Belanja Tanah	5.698.253.650,00	5.602.622.200,00	98,32
	Belanja Peralatan dan Mesin	38.763.546.157,00	36.169.285.663,00	93,31
	Belanja Gedung dan Bangunan	144.620.760.073,00	124.531.714.063,00	86,11
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.741.858.034,00	96.234.137.116,00	97,46
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.431.939.800,00	2.382.267.878,00	97,96
	BELANJA TAK TERDUGA	285.870.000,00	6.500.500,00	2,27
	Belanja Tak Terduga	285.870.000,00	6.500.500,00	2,27
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.063.342.735,00)	-27.143.080.799,09	64,53
2	PEMBIAYAAN DAERAH			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.004.717.735,00	44.992.218.337,91	99,97
	"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya"	45.004.717.735,00	44.992.218.337,91	99,97
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-

Dipindahkan

	PENGELUARAN DAERAH	2.941.375.000,00	2.941.373.129,24	100,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.941.375.000,00	2.941.373.129,24	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.063.342.735,00	42.050.845.208,67	99,97
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	14.907.764.409,58	100,00

Sumber :Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
Tahun 2022

Tabel 8. Laporan Penggunaan dan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2023 kota Palopo

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN2023 (Rp)	%
1	BELANJA DAERAH	1.144.221.381.279,00	927.786.559.285,76	81,08
	BELANJA OPERASI	820.878.817.249,00	745.228.569.548,96	90,78
	Belanja Pegawai	456.816.650.847,00	428.698.208.691,01	93,84
	Belanja Barang dan Jasa	339.662.321.412,00	303.586.612.414,95	89,38
	Belanja Bunga	1.100.000.000,00	1.097.664.953,00	99,79
	Belanja Hibah	23.072.844.990,00	11.735.083.490,00	50,86
	Belanja Bantuan Sosial	227.000.000,00	111.000.000,00	48,90
	BELANJA MODAL	322.842.564.030,00	182.557.989.736,80	56,55
	Belanja Tanah	4.500.995.620,00	2.929.937.020,00	65,10
	Belanja Peralatan dan Mesin	33.879.952.949,00	27.169.075.627,00	80,19
	Belanja Gedung dan Bangunan	177.387.574.961,00	96.589.452.094,00	54,45
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.013.089.200,00	53.849.358.711,80	51,28
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.060.951.300,00	2.020.166.284,00	98,02
	BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	-
	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.966.389.410,00)	15.303.677.586,95	(127,89)
2	PEMBIAYAAN DAERAH			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.907.764.410,00	14.907.764.409,58	100,00
	"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya"	14.907.764.410,00	14.907.764.409,58	100,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-

Dipindahkan

	PENGELUARAN DAERAH	2.941.375.000,00	2.941.373.130,00	100,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.941.375.000,00	2.941.373.130,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	11.966.389.410,00	11.966.391.279,58	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	27.270.068.866,53	100,00

Sumber :Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo Tahun 2023

Berdasarkan dari keempat tabel diatas bisa kita lihat perbandingan selisih anggaran belanja daerah serta realisasi anggaran belanja antara tahun 2020 - 2023, yaitu pada tahun 2020 anggaran belanja sebesar 1.094.240.116.346,00 dan realisasi anggarannya 943.885.796.203,19 Sedangkan pada tahun anggaran 2023 Anggaran Belanja mengalami kenaikan sebesar 1.144.221.381.279,00 sedangkan realisasi belanjanya mengalami penurunan sebesar 927.786.559.285,76.

Pembiayaan Netto tidak jauh berbeda dari pendapatan dan belanja, yaitu dimana pembiayaan Netto tahun 2020 - 2023 mengalami penurunan sebesar 11.966.391.279,58. Surplus atau Defisit dapat dilihat selisih antara jumlah Pendapatan dan jumlah Belanja yang ada pada tahun 2020 – 2023, Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel ringkasan dibawah ini.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Tahun 2020 - 2023

No	Uraian	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	2020	969.562.250.067,00	969.408.934.593,27
		2021	957.596.278.224,00	936.589.797.578,17
		2022	1.035.363.603.924,00	988.195.057.607,29
		2023	1.132.254.991.869,00	943.090.236.872,71
2	Belanja	2020	1.094.240.116.346,00	943.885.796.203,19
		2021	1.001.572.261.730,00	935.475.348.254,12
		2022	1.077.426.946.659,00	1.015.338.138.406,38
		2023	1.144.221.381.279,00	927.786.559.285,76
3	Surplus/Defisit	2020	(124.677.866.279,00)	25.523.138.390,08
		2021	(43.975.983.506,00)	1.114.449.324,05
		2022	(42.063.342.735,00)	(27.143.080.799,09)
		2023	(11.966.389.410,00)	15.303.677.586,95
4	Pembiayaan Netto	2020	124.677.866.279,00	21.308.503.150,02
		2021	43.975.983.506,00	43.890.268.410,86
		2022	42.063.342.735,00	42.050.845.208,67
		2023	11.966.389.410,00	11.966.391.279,58
5	Silpa	2020	0,00	46.831.641.540,10
		2021	0,00	45.004.717.734,91
		2022	0,00	14.907.764.409,58
		2023	0,00	27.270.068.866,53

Sumber : Data diolah penulis

Analisis laporan keuangan memainkan peran penting dalam menafsirkan informasi keuangan dan operasi entitas. Itulah sebabnya banyak analis menggunakan rasio keuangan untuk menganalisis dan menafsirkan laporan keuangan. Menggunakan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pengambil keputusan merancang kebijakan yang masuk akal dan konsisten dengan tujuan masyarakat, karena analisis laporan dapat mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan masyarakat. Analisis terhadap indikator-indikator utama APBD dilakukan dengan membandingkan hasil musim dengan musim sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungannya.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber keuangan eksternal. *Semakin tinggi kemandirian daerah maka semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan dari pihak luar (terutama pemerintah pusat dan daerah) dan begitupun sebaliknya.*

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{RKKD tahun 2020} &= \frac{49.713.936.705,48}{796.168.632.115,00} \times 100\% \\ &= 6,24 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{RKKD tahun 2021} &= \frac{55.009.392.207,64}{777.737.136.809,00} \times 100\% \\ &= 7,07 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{RKKD tahun 2022} &= \frac{66.495.009.336,00}{813.048.040.559,00} \times 100\% \\ &= 8,18 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{RKKD tahun 2023} &= \frac{64.595.190.898,00}{746.306.406.557,00} \times 100\% \\ &= 8,66 \%\end{aligned}$$

Tabel 10. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 sampai 2023

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2020	49.713.936.705,48	796.168.632.115,00	6.24	Instruktif
2021	55.009.392.207,64	777.737.136.809,00	7.07	Instruktif
2022	66.495.009.336,00	813.048.040.559,00	8.18	Instruktif
2023	64.595.190.898,00	746.306.406.557,00	8.66	Instruktif

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas kemampuan keuangan Kota Palopo tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 6.24%, dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 8.66%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. *Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PAD} &= \frac{177.205.052.456,65}{173.393.617.952,00} \times 100\% \\ &= 102,20 \end{aligned}$$

Tabel 11. Ringkasan Laporan Realisasi Tahun 2020 Kota Palopo

No	Uraian	Jumlah		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PENDAPATAN	969.562.250.067,00	969.408.934.593,27	99,98
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	173.393.617.952,00	177.205.052.456,65	102,20
	PENDAPATAN TRANSFER	669.756.718.109,00	665.583.965.763,00	99,38
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126.411.914.006,00	126.619.916.373,62	100,16

Sumber : Data diolah penulis

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{140.133.041.613,17}{153.896.341.415,00} \times 100\%$$

$$= 91,06\%$$

Tabel 12. Ringkasan Laporan Realisasi Tahun 2021 Kota Palopo

No	Uraian	Jumlah		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PENDAPATAN	957.596.278.224,00	936.589.797.578,17	97,81
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.896.341.415,00	140.133.041.613,17	91,06
	PENDAPATAN TRANSFER	777.737.136.809,00	770.932.817.337,00	99,13
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.962.800.000,00	25.523.938.628,00	98,31

Sumber : Data diolah penulis

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{178.675.849.643,29}{188.028.163.277,00} \times 100\%$$

$$= 95,03\%$$

Tabel 13. Ringkasan Laporan Realisasi Tahun 2022 Kota Palopo

No	Uraian	Jumlah		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PENDAPATAN	1.035.363.603.924,00	988.195.057.607,29	95,44
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	188.028.163.277,00	178.675.849.643,29	95,03
	PENDAPATAN TRANSFER	813.048.040.559,00	799.667.311.290,00	98,35
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.287.400.088,00	9.851.896.674,00	28,73

Sumber : Data diolah penulis

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas PAD} &= \frac{194.013.652.599,96}{343.052.414.226,00} \times 100\% \\ &= 56,56\%\end{aligned}$$

Tabel 14. Ringkasan Laporan Realisasi Tahun 2023 Kota Palopo

No	Uraian	Jumlah		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PENDAPATAN	1.132.254.991.869,00	943.090.236.872,71	83,29
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	343.052.414.226,00	194.013.652.599,96	56,56
	PENDAPATAN TRANSFER	746.306.406.557,00	736.794.913.617,75	98,73
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.896.171.086,00	12.281.670.655,00	28,63

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan pada tabel dapat diatas diketahui bahwa efektivitas keuangan Kota Palopo pada tahun 2020 termasuk Efektif karena rasio yang di peroleh untuk tahun 2020 sebesar 102,20 % sedangkan pada tahun 2021 - 2023 termasuk tidak efektif karena nilai rasio yang diperoleh kurang dari 100 % . Hal tersebut terjadi karena diakibatkan realisasi anggaran yang lebih kecil dari pada anggaran Seperti

pada tabel di bawah.

Tabel 15.Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Palopo

Tahun anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2020	173.393.617.952,00	177.205.052.456,65	102,20	efektif
2021	153.896.341.415,00	140.133.041.613,17	91,06	Tidak efektif
2022	188.028.163.277,00	178.675.849.643,29	95,03	Tidak efektif
2023	343.052.414.226,00	194.013.652.599,96	56,56	Tidak efektif

Sumber : Data diolah penulis

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. *Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

$$\begin{aligned}\text{REKD tahun 2020} &= \frac{943.885.796.203,19}{969.408.934.593,27} \times 100\% \\ &= 97.37\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{REKD tahun 2021} &= \frac{935.475.348.254,12}{936.589.797.578,17} \times 100\% \\ &= 99.88\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{REKD tahun 2022} &= \frac{1.015.338.138.406,38}{988.195.057.607,29} \times 100\% \\ &= 102.75\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{REKD tahun 2023} &= \frac{927.786.559.285,76}{943.090.236.872,71} \times 100\% \\ &= 98,38\%\end{aligned}$$

Tabel 16. laporan efisiensi keuangan daerah Kota Palopo tahun 2020 – 2023

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan(Rp)	Realisasi Belanja(Rp)	REKD(%)	Kriteria
2020	969.408.934.593,27	943.885.796.203,19	97,37	Efisien
2021	936.589.797.578,17	935.475.348.254,12	99,88	Efisien
2022	988.195.057.607,29	1.015.338.138.406,38	102,75	Kurang Efisien
2023	943.090.236.872,71	927.786.559.285,76	98,38	Efisien

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan pengolahan pada tabel 16 di atas kita dapat melihat bahwa efisiensi Keuangan Daerah Kota Palopo pada tahun 2020,2021, dan 2023 tergolong efisien dikarenakan nilai rasionya di dibawah 100%. Sedangkan tahun 2022 tergolong kurang efisien dimana tingkat rasionya lebih dari 100%.